

ASEAN BRIEFS

Menanti Pencapaian Baru ASEAN:
Perkembangan dan Solusi atas Krisis Myanmar
di Bawah Kepemimpinan Kamboja



Vol. 8/ Issue 1/ Maret 2022



ASEAN Briefs adalah publikasi berkala tentang perkembangan terkini mengenai regionalisme ASEAN, khususnya di pilar Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya.

**The Habibie Center -
ASEAN Briefs Program Studi ASEAN**

Penanggung jawab:

Mohammad Hasan Ansori

(Direktur Eksekutif)

Julia Novrita

(Direktur Program dan Pengembangan)

Peneliti:

Luthfy Ramiz

Marina Ika Sari

Desain dan Publikasi:

Mayka R.

Krisis Myanmar: Bergesernya Kudeta Militer menjadi Krisis Kemanusiaan

Selama 74 tahun kemerdekaan Myanmar, kudeta militer pada Februari 2021 lalu bukanlah satu-satunya kudeta militer yang pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan negara tersebut. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win memimpin kudeta dan sukses menggulingkan pemerintah demokrasi Myanmar pimpinan Perdana Menteri U Nu. Menurut Jenderal Ne Win, kudeta yang dinilai “tanpa pertumpahan darah” ini dipicu oleh berbagai kekhawatiran, terutama atas permasalahan ekonomi dan adanya potensi disintegrasi di Myanmar.¹ Namun, semakin memburuknya keadaan ekonomi Myanmar sejak kudeta militer tahun 1962 telah menimbulkan pergolakan dan protes besar-besaran di kalangan sipil pada tahun 1988, atau yang dikenal dengan istilah *The Uprising of 8888*.

Kudeta pada tahun 1988 kembali diprakarsai oleh junta militer Myanmar (Tatmadaw), setelah meluasnya pergolakan dan protes di kalangan sipil selama lima bulan lamanya yang terjadi sejak bulan Mei hingga Agustus 1988 yang menuntut rezim militer turun dari kekuasaan. Tatmadaw, yang dipimpin oleh Jenderal Saw Maung berhasil merebut pemerintahan pada September 1988 dan memberlakukan darurat

militer, serta merespon pergolakan sipil tersebut secara militer.² Kekerasan yang ditimbulkan sebagai respons atas pergolakan sipil terhadap kudeta militer tersebut diperkirakan telah menelan korban jiwa sebanyak 3.000 jiwa³ dan dinilai sebagai kekerasan militer yang paling brutal dalam sejarah Myanmar.

Pada tahun 2010, pemerintah sipil Myanmar terbentuk sejak diadakannya pemilihan umum dan reformasi pada berbagai bidang juga dilakukan secara berangsur-angsur hingga akhir 2011. Reformasi besar-besaran ini diantaranya pada bidang ekonomi, politik, dan hak asasi manusia yang ditandai dengan dibebaskannya Aung San Suu Kyi serta dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, kudeta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing pada 1 Februari 2021 kembali mengakhiri 10 tahun pemerintahan sipil di Myanmar.

Pada 1 Februari 2021, Tatmadaw melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Pengambilalihan militer terjadi beberapa bulan setelah kemenangan telak NLD selama pemilihan November 2020, dengan meraih 396 dari 476 kursi parlemen.⁴ Pihak Tatmadaw menentang hasil pemilu tersebut dengan dugaan telah terjadi kecurangan selama pemilu dan menuntut pemungutan suara ulang. Penasihat Negara Aung San Suu

Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin NLD lainnya ditangkap sebagai tahanan rumah dan kekuasaan saat ini berada di tangan Jenderal Min Aung Hlaing.⁵ Status keadaan darurat di Myanmar diberlakukan selama satu tahun, tetapi kemudian diperpanjang hingga Agustus 2023. Tatmadaw menyatakan akan mengadakan pemilu ulang yang bebas dan adil setelah keadaan darurat selesai.⁶

Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar-besaran dari berbagai kalangan masyarakat Myanmar yang menyatakan penolakan atas kudeta dan menuntut untuk memulihkan demokrasi.⁷ Berbagai bentuk aksi protes dilakukan seperti unjuk rasa di jalan, melalui media sosial, hingga melakukan mogok kerja massal sebagai bentuk aksi “pemogokan senyap”.⁸ Untuk meredam aksi demonstrasi tersebut, Tatmadaw menerapkan aturan jam malam, pemutusan jaringan internet untuk membatasi akses informasi di dunia maya, pembatasan kerumunan, pengerahan kendaraan lapis baja, dan penggunaan kekerasan seperti peluru karet, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan massa.⁹

Situasi di Myanmar semakin memburuk setahun pasca kudeta. Permasalahan politik domestik telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Berdasarkan data dari *Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)*, protes atas kudeta telah mengakibatkan sekitar 1.500 orang tewas dan 11.838 penentang telah ditangkap oleh pihak militer.¹⁰ Kemudian, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* juga mencatat bahwa total pengungsi internal akibat dari konflik bersenjata dan kerusuhan sipil di Myanmar meningkat hingga 405.700 orang sejak Februari 2021 hingga Januari 2022. Sebanyak 6,2 juta orang juga diperkirakan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat tahun ini.¹¹

Krisis kemanusiaan juga diperburuk dengan sulitnya akses dan distribusi bantuan kemanusiaan yang diakibatkan oleh pemberlakuan beberapa kebijakan oleh Tatmadaw. Menurut laporan *Refugees International*, Tatmadaw melakukan blokade terhadap distribusi bantuan kemanusiaan dan menerapkan sejumlah pembatasan yang berdampak secara tidak langsung pada distribusi bantuan.¹² Per Oktober 2021, pembatasan yang diberlakukan antara lain akses terhadap perbankan dan peningkatan pengawasan terhadap transfer asing ke organisasi non-pemerintah, serta akses internet dan telepon. *Human Rights Watch* juga melaporkan bahwa Tatmadaw juga menerapkan pembatasan perjalanan bagi pekerja kemanusiaan sebagai bentuk blokade.¹³

Dengan adanya berbagai pembatasan tersebut, masyarakat Myanmar mengalami krisis sosial ekonomi yang diperparah oleh kebijakan *lockdown* akibat pandemi COVID-19.¹⁴ Kudeta militer telah menyebabkan kolapsnya sejumlah infrastruktur penting dan Myanmar bahkan mengalami resesi ekonomi hingga 30 persen.¹⁵ Nilai mata uang Kyat juga mengalami inflasi sebesar 25 persen sehingga mengakibatkan harga pangan dan kebutuhan lainnya melonjak tajam.¹⁶ Akhirnya, eskalasi krisis kemanusiaan di Myanmar yang diakibatkan oleh kudeta militer merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Reaksi dunia internasional terhadap isu kudeta di Myanmar pun beragam. Kudeta militer oleh Tatmadaw mengakibatkan munculnya berbagai kecaman, pemberlakuan sanksi ekonomi, hingga reaksi netral untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Uni Eropa mengecam kudeta yang

dilakukan Tatmadaw karena dinilai telah merusak demokrasi dan supremasi hukum serta melanggar hak asasi manusia.¹⁷ Selain itu, negara-negara tersebut juga menjatuhkan sanksi seperti larangan perjalanan, pembekuan aset, dan memasukkan sejumlah bisnis atau perusahaan yang terkait dengan Tatmadaw ke dalam daftar hitam. Sanksi tersebut bertujuan untuk merugikan Tatmadaw secara finansial sebagai bentuk tekanan internasional.¹⁸ Di sisi lain, China dan Rusia mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan intimidasi sepihak, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan meninggalkan konfrontasi di kawasan.¹⁹ China berpendapat bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.

Di level regional, suara ASEAN terpecah karena setiap negara anggota ASEAN memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi isu kudeta Myanmar. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina menganggap kudeta dan krisis di Myanmar sebagai urusan internal sehingga ASEAN tidak perlu melakukan intervensi. Sementara itu, Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengekspresikan keprihatinan yang mendalam atas pergolakan politik di Myanmar dan menyerukan pihak terkait untuk menahan diri serta menyelesaikan sengketa melalui dialog yang damai.²⁰

Menilai Tindakan Kolektif ASEAN dalam Menangani Krisis Myanmar

Walaupun mengalami dilema terpecahnya suara negara anggota dalam menanggapi isu kudeta di Myanmar, ASEAN telah mengambil empat langkah kolektif dalam merespons krisis tersebut. Pertama, sesaat setelah terjadinya kudeta militer, ASEAN menyerukan

didorongnya dialog dan normalisasi keadaan di Myanmar dan menyelenggarakan pertemuan khusus antara menteri luar negeri negara anggota ASEAN dan perwakilan otoritas Tatmadaw pada bulan Maret 2021. Pertemuan khusus tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang menyerukan agar pihak-pihak terkait dapat menahan diri untuk melakukan aksi kekerasan.

Kedua, pada Pertemuan Pemimpin ASEAN yang digelar di Jakarta pada 24 April 2021, para pemimpin negara atau utusan dari negara anggota ASEAN, termasuk pemimpin Tatmadaw, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyetujui Lima Poin Konsensus yang berisi:²¹

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya;
2. Dialog konstruktif antara semua pihak terkait harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat;
3. Utusan khusus akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN;
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre); dan
5. Utusan khusus dan delegasi mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Dua hal penting yang ingin dicapai dalam proses penerapan Lima Poin Konsensus tersebut adalah penghentian terhadap penggunaan kekerasan dan kunjungan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar untuk membangun komunikasi dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar. Implementasi Lima Poin Konsensus merupakan langkah awal menuju dialog yang inklusif. Penerapan Lima Poin Konsensus tersebut sangat

penting bagi rakyat Myanmar, stabilitas dan perdamaian di kawasan, serta bagi kredibilitas ASEAN. Namun, sayangnya tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi Lima Poin Konsensus oleh Myanmar, baik dalam membangun dialog maupun menekan kekerasan di Myanmar setahun belakangan.²² Berdasarkan data dari UNHCR, kekerasan yang melibatkan Tatmadaw, *People's Defence Forces*, sipil, dan organisasi bersenjata lainnya, masih banyak terjadi di Myanmar bagian tenggara, utara, barat laut, dan Rakhine.²³

Ketiga, ASEAN melakukan pendekatan minilateralisme melalui pertemuan khusus antara Jenderal Min Aung Hlaing, Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi, dan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof pada tanggal 4 Juni 2021. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan, pertemuan tersebut menuai kritik dari pihak *National Unity Government* (NUG) karena dinilai tidak melibatkan berbagai pihak di Myanmar secaraimbang.

Kemudian, pendekatan keempat ASEAN adalah melalui penunjukan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof sebagai Utusan Khusus untuk Myanmar. Utusan Khusus untuk Myanmar bertugas untuk mengakhiri kekerasan, membuka dialog dengan para pihak terkait baik Tatmadaw maupun pihak oposisi dalam kerangka mewujudkan sentralitas ASEAN, serta memantau distribusi bantuan kemanusiaan di Myanmar.²⁴ Namun, dalam prakteknya, Erywan Yusof tidak dapat berkunjung ke Myanmar karena Tatmadaw tidak memberikan akses untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi.²⁵ Selain itu, Tatmadaw berdalih bahwa izin kunjungan akan diberikan setelah keadaan membaik di Myanmar.²⁶

Akibat kurangnya kemajuan yang signifikan dari Myanmar terhadap berbagai upaya perdamaian di atas, ASEAN memutuskan pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu tidak mengundang pemimpin Tatmadaw ke pertemuan puncak ASEAN. ASEAN memutuskan hanya mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-38 dan ke-39 pada Oktober 2021 lalu.²⁷ Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyatakan sangat keberatan dengan keputusan ASEAN dan menolak untuk mengirim perwakilan non-politik sebagai bentuk protes. Akhirnya, KTT ASEAN tersebut berlangsung tanpa kehadiran Myanmar.²⁸ Pengecualian terhadap pemimpin Tatmadaw tersebut menjadi sikap teguran paling tegas yang dilakukan oleh ASEAN sejauh ini. Akhirnya, Tatmadaw mengambil sikap “menolak untuk menerima hasil pertemuan yang dianggap berseberangan dengan Piagam ASEAN”,²⁹ yang termasuk di dalamnya seruan ASEAN untuk mengakhiri kekerasan dan mengimplementasikan Lima Poin Konsensus.

Krisis yang terjadi di Myanmar menjadi sebuah tantangan dan ujian bagi soliditas dan sentralitas ASEAN yang membutuhkan komitmen kuat dari setiap negara anggotanya untuk menjunjung tinggi demokrasi, *good governance*, hukum, dan hak asasi manusia sesuai Piagam ASEAN Pasal 1 (7). Namun, tantangannya adalah ASEAN juga harus mematuhi Piagam ASEAN Pasal 2 (e) yang menyatakan bahwa negara anggota ASEAN tidak melakukan intervensi terhadap masalah domestik negara anggotanya.³⁰ Sedangkan Piagam ASEAN yang diadopsi pada tahun 2007 tersebut tidak memiliki pedoman tentang bagaimana menyikapi kudeta di negara anggota ASEAN yang dapat memicu ketidakstabilan domestik dan regional.³¹

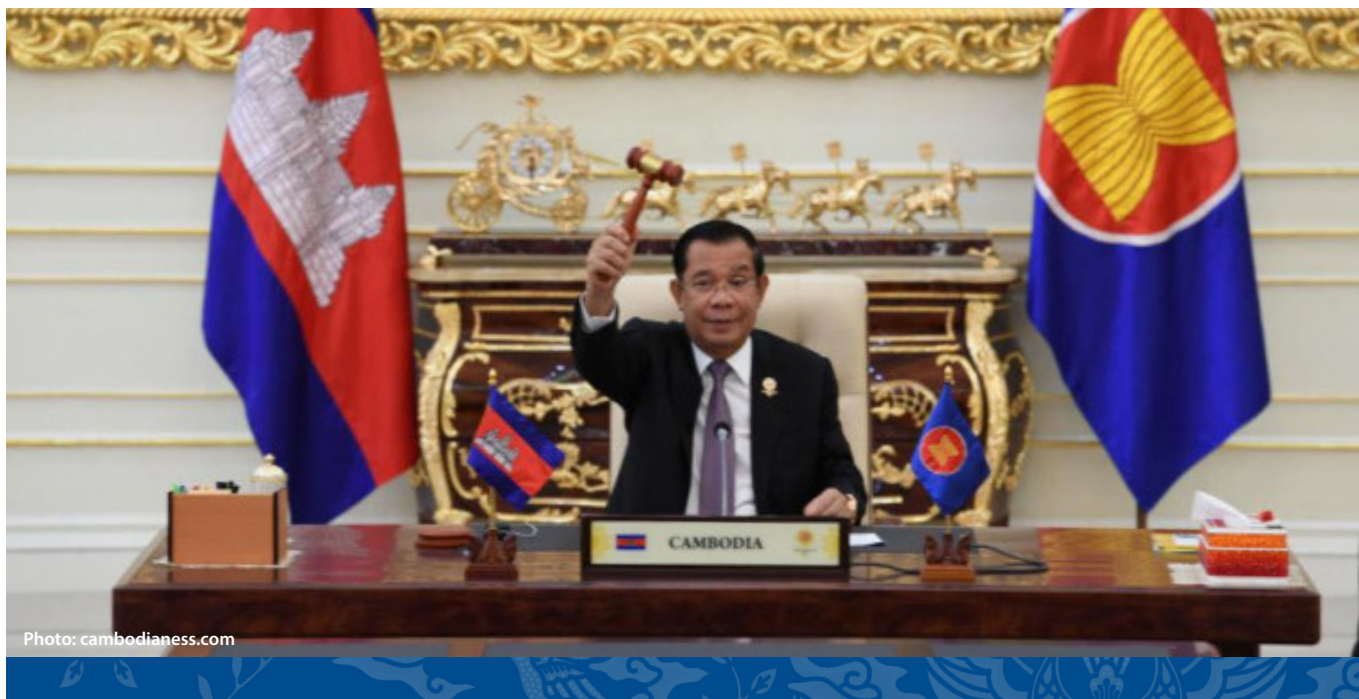


Photo: cambodianess.com

ASEAN sebagai badan kolektif regional memiliki karakteristik khusus seperti pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan berpegang teguh pada prinsip non-intervensi. Di satu sisi, prinsip non-intervensi dinilai sebagai salah satu faktor penting yang membantu ASEAN dapat bertahan dan stabil hingga saat ini. Di sisi lain, prinsip non-intervensi dianggap kurang berdampak besar terhadap pemecahan isu sensitif karena prinsip ini cenderung mengaburkan fokus penyelesaian isu tersebut.³² Dalam kasus krisis Myanmar, pergerakan ASEAN dapat dikatakan menjadi terbatas karena tidak dapat mencampuri urusan internal Myanmar. Sehingga secara otomatis, Tatmadaw yang secara *de facto* menjalankan pemerintahan di Myanmar memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan kebijakannya dengan dalih kedaulatan nasional. Menelaah pengalaman ASEAN sebelumnya, tercatat ASEAN pernah mengecualikan prinsip non-intervensi pada kasus Tatmadaw yang menolak bantuan internasional pada masa bencana Topan Nargis pada tahun 2008.³³

Prospek Pendekatan Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2022 dalam Krisis Myanmar

Sebagaimana Kamboja telah mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2022, peningkatan peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar tak ayal menjadi salah satu tugas yang diemban oleh Kamboja. Salah satu agenda prioritas keketuaan Kamboja adalah memperbaiki situasi di Myanmar yang didasarkan pada Lima Poin Konsensus dan Piagam ASEAN sebagai prinsip panduan dalam menangani krisis. Melalui konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Kamboja, situasi luar biasa seperti krisis Myanmar perlu ditangani dengan tindakan yang luar biasa juga.³⁴ Kepemimpinan Kamboja akan menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam membangun suasana yang kondusif untuk membangun dialog dan menciptakan kepercayaan berbagai pihak dalam mengurangi kekerasan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.³⁵

Pendekatan Kamboja terhadap krisis Myanmar sejauh ini dapat dilihat pada kunjungan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar pada 7 Januari 2022. Kunjungan kenegaraan dari seorang kepala pemerintahan ke Myanmar ini adalah yang pertama sejak terjadinya kudeta militer. Perdana Menteri Hun Sen, bersama dengan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn, dalam lawatannya bertemu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan jajaran pejabat Tatmadaw dalam *State Administration Council* (SAC).

Lawatan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar selama dua hari tersebut memicu protes dan demonstrasi dari rakyat Myanmar.³⁶ Selain itu, beragam tanggapan juga muncul di antara negara anggota ASEAN. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah khawatir atas kunjungan Perdana Menteri Kamboja ke Myanmar karena dapat dinilai sebagai bentuk legitimasi terhadap pemerintahan Tatmadaw dan Kamboja seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para pemimpin ASEAN lainnya dan meminta pandangan tentang apa yang harus dilakukan sebelum berkunjung ke Myanmar.³⁷

Perbedaan pendapat di dalam tubuh ASEAN ini memicu penangguhan pertemuan *retreat* antar Menteri Luar Negeri ASEAN yang sejatinya dilaksanakan pada 18-19 Januari 2022. Akhirnya, setelah sempat ditunda, pertemuan *retreat* para Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan pada 17 Februari 2022.³⁸ Kamboja awalnya menunjukkan gestur ingin mengundang pemimpin Tatmadaw Myanmar ke pertemuan ASEAN dengan syarat sudah ada kemajuan dalam memenuhi Lima Poin Konsensus yang telah disepakati ASEAN. Tindakan ini mengindikasikan bahwa Kamboja berupaya ingin melibatkan Tatmadaw dalam forum ASEAN, bukan mengisolasinya.

Namun, Kamboja mendapatkan tekanan dari beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, untuk tidak mengalah pada kesepakatan Lima Poin Konsensus yang didukung oleh PBB dan Amerika Serikat.³⁹ Akhirnya, Kamboja pun memutuskan hanya mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuan tersebut alih-alih pemimpin Tatmadaw. Hal ini ditanggapi oleh Myanmar dengan tidak berpartisipasi atau mengirimkan perwakilan non-politiknya. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri tersebut, krisis Myanmar masih menjadi pembahasan utama dan ASEAN kembali mengingatkan Myanmar agar menerapkan Lima Poin Konsensus.⁴⁰

Walaupun lawatan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar telah “memecah” suara ASEAN, namun di sisi lain dapat memberikan kesempatan untuk berdialog dengan pihak Tatmadaw. Dialog tersebut diantaranya terkait keputusan untuk memperpanjang waktu gencatan senjata antara Tatmadaw dan kelompok bersenjata etnis hingga akhir 2022, penyelenggaraan pertemuan konsultatif antara Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Sekretaris Jenderal ASEAN, perwakilan *AHA Centre*, Gugus Tugas Nasional Myanmar, Palang Merah Myanmar, dan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan, serta berdiskusi tentang pengalaman proses perdamaian yang terjadi Kamboja. Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Senior Min Aung Hlaing kembali menegaskan bahwa Tatmadaw menjamin kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait dengan pertimbangan situasi di Myanmar dan menyatakan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus adalah pelengkap dari implementasi Peta Jalan Lima Poin dari SAC.

Peta Jalan Lima Poin merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Tatmadaw melalui SAC pada 1 Februari 2021. Peta Jalan Lima Poin tersebut berisi kebijakan Tatmadaw untuk:⁴¹

1. Menginvestigasi komisi pemilihan umum dan daftar pemilih;
2. Melanjutkan langkah preventif COVID-19, termasuk vaksinasi;
3. Memberikan bantuan kepada entitas bisnis yang terdampak pandemi COVID-19 dan implementasi perjanjian investasi yang ada;
4. Memperluas Perjanjian Gencatan Senjata dengan kelompok bersenjata etnis; dan
5. Melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil setelah kondisi darurat nasional berakhir, serta alih kekuasaan kepada pihak yang memenangkan pemilu.

Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan atas pernyataan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam lawatan Perdana Menteri Hun Sen. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Myanmar harus memberikan akses komunikasi kepada Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dengan seluruh pihak-pihak terkait di Myanmar dan implementasi Lima Poin Konsensus tidak seharusnya dikaitkan dengan implementasi Peta Jalan Lima Poin SAC. Namun, Presiden Joko Widodo turut menyambut baik wacana pertemuan konsultatif terkait pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar.⁴²

Langkah yang diambil Kamboja terhadap krisis Myanmar sejauh ini telah “mencairkan” hubungan antara ASEAN dan Myanmar yang membeku pasca kudeta militer. Mencairnya hubungan tersebut berpotensi membangun unsur-unsur yang sejatinya “hilang” dalam proses implementasi Lima Poin Konsensus setahun belakangan – situasi yang kondusif

untuk membangun dialog dan kepercayaan.

Dalam kunjungannya ke Myanmar, Perdana Menteri Hun Sen berupaya untuk membangun kepercayaan pihak Tatmadaw sebagai pemerintah *de facto* Myanmar melalui dialog untuk kemudian mendiskusikan hal-hal secara implisit yang berkaitan dengan implementasi Lima Poin Konsensus oleh Myanmar, diantaranya akses pada pemberian bantuan kemanusiaan. Senior Jenderal Min Aung Hlaing akan mengizinkan Utusan Khusus ASEAN untuk bertemu dengan anggota partai NLD. Dengan adanya kunjungan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn pada 20-23 Maret 2022,⁴³ bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa nantinya Kamboja dapat melibatkan pihak lainnya dalam dialog sesuai dengan Lima Poin Konsensus.

Selain kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar, pendekatan Kamboja terhadap penyelesaian krisis Myanmar juga ditandai dengan wacana pembentukan tripartit antara Kamboja, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Melalui pernyataannya, Perdana Menteri Hun Sen menegaskan pembentukan tripartit tersebut berkaitan dengan perpanjangan waktu gencatan senjata di Myanmar hingga akhir 2022.⁴⁴ Mediasi menggunakan metode tripartit merupakan salah satu praktek yang sebelumnya pernah diimplementasikan oleh ASEAN pada proses perdamaian di Kamboja pada akhir abad ke-20.

Kamboja dan Myanmar memiliki sejumlah kesamaan latar belakang di lingkup ASEAN. Selain keduanya merupakan bagian dari kelompok negara *Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam* (CLMV), keduanya juga memiliki sejarah guncangan situasi politik internal akibat kudeta. Pada tahun 1997, situasi politik



di Kamboja terganggu akibat penggulingan Perdana Menteri Pertama Kamboja, Norodom Ranariddh, oleh Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kedua, Hun Sen. Kudeta disertai dengan campur tangan kekuatan militer dan rangkaian kekerasan di beberapa wilayah di Kamboja. ASEAN, melalui kesepakatan yang dihasilkan dalam *Asian Regional Forum* (ARF) dengan dukungan sejumlah mitra wicaranya, memimpin penanganan krisis akibat kudeta.⁴⁵ Kamboja dianggap memiliki situasi politik yang mengancam stabilitas di kawasan. Hal ini dinilai sebagai salah satu justifikasi peran ASEAN dalam penanganan krisis di Kamboja, selain karena alasan Kamboja yang sedang dalam proses pengajuan keanggotaan ASEAN di masa itu.

Proses penanganan krisis di Kamboja yang dipimpin oleh ASEAN tetap dilandaskan pada asas non-intervensi, sesuai yang diamanatkan dalam *Treaty of Amity and*

Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan diantaranya melalui pembentukan tripartit. Tripartit terdiri dari Menteri Luar Negeri Filipina Domingo Siazon, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, dan Menteri Luar Negeri Thailand Prachuab Chaiyasarn. Tripartit tersebut bertugas menyusun mekanisme mediasi dan memfasilitasi proses perdamaian di Kamboja. Tidak hanya didukung oleh mediasi yang difasilitasi oleh tripartit ASEAN, proses perdamaian di Kamboja juga didorong oleh mitra wicara ASEAN. Hal tersebut dapat dilihat pada peran kelompok *ad hoc Friends of Cambodia* yang terdiri dari Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Russia, dan Amerika Serikat yang mendukung kinerja tripartit dan mendorong solusi atas krisis Kamboja, termasuk pengakhiran kekerasan, jaminan keamanan kepada Norodom Ranariddh, penyelenggaraan pemilu yang adil, serta jaminan hak ikut serta kepada semua pihak dalam pemilu.⁴⁶

Berkaca pada langkah yang telah ditempuh dan yang berpotensi untuk dilakukan oleh Kamboja sebagai Ketua ASEAN serta sikap negara anggota ASEAN lainnya, keberhasilan Kamboja dalam menangani krisis Myanmar masih perlu terus diamati ke depannya mengingat dinamika kawasan yang terus berkembang. Kinerja Kamboja dalam menangani masalah internal di kawasan dapat dinilai setelah masa jabatannya selesai pada akhir tahun 2022. Konsekuensi yang pasti, jika krisis Myanmar tidak dapat diselesaikan tahun ini, tugas ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan soliditas dan komitmen yang kuat dari semua negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar.

Rekomendasi

1. Setelah sebelumnya prinsip non-intervensi pernah dikecualikan pada respons ASEAN terhadap kasus Topan Nargis tahun 2008, ASEAN perlu mengkaji penerapan prinsip non-intervensi secara lebih fleksibel pada kasus kemanusiaan serupa, khususnya dalam skema sentralitas ASEAN terhadap krisis Myanmar. Tak hanya fleksibilitas dalam menerapkan prinsip non-intervensi, ASEAN juga perlu menyelaraskan implementasi dari prinsip-prinsip lain yang juga tercantum dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip *good governance*, dan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Kamboja perlu memfasilitasi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dalam membangun dialog dan kepercayaan agar dapat menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar perlu terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar baik dari Tatmadaw maupun pihak NLD agar mendapatkan informasi dan pandangan dari kedua belah pihak secara langsung. Selain itu, suara dari organisasi masyarakat sipil dan rakyat Myanmar juga perlu menjadi perhatian untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Kemudian, negara anggota ASEAN perlu menyepakati peta jalan dan memberikan tenggat waktu kepada pihak junta militer untuk memastikan bahwa Lima Poin Konsensus benar-benar diterapkan di Myanmar.

3. Kamboja perlu mendorong wacana pembentukan tripartit sebagai bagian dari proses mediasi krisis Myanmar di level ASEAN. Wacana tersebut dapat dikembangkan berdasarkan praktek lampau dari proses

perdamaian di Kamboja. Selain itu, Kamboja dapat menggalang dukungan dan komitmen mitra wicara ASEAN untuk mendukung proses mediasi tersebut.

4. Indonesia perlu memainkan perannya secara lebih aktif dalam mendukung langkah dan pendekatan Kamboja dalam memediasi krisis Myanmar pada level ASEAN. Sehingga, jika krisis Myanmar tidak dapat diselesaikan dalam tahun ini, Indonesia dapat melanjutkan dan meningkatkan upaya yang telah dilakukan oleh Kamboja sebelumnya, mengingat Indonesia akan menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023.





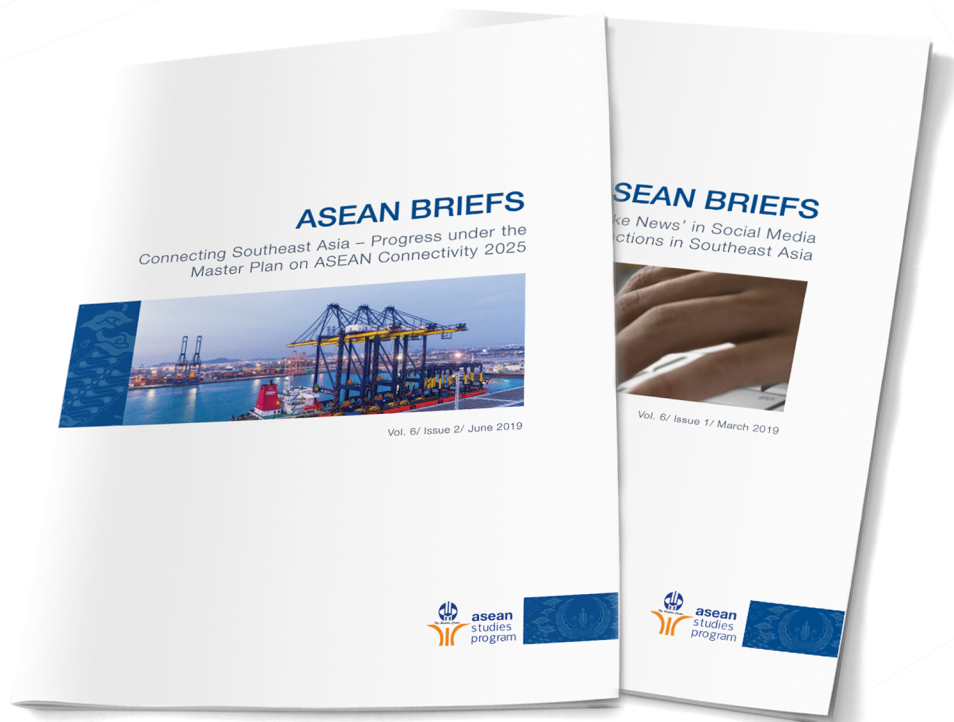
Endnotes

- 1 LaFantasie, G., Sampson, C., & Miller, J. (1994). *Foreign relations of the United States, 1961-1963* (23rd ed.). United States Government Printing Office.
- 2 Ferrara, F. (2003). Why Regimes Create Disorder: Hobbes's Dilemma During a Rangoon Summer. *The Journal of Conflict Resolution*, 47(3), 302-325. <https://doi.org/10.1177/0022002703047003003>.
- 3 Hadiz, V. (2006). *Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia* by Vincent Boudreau Cambridge University Press.Social Forces, 84(4), 2356-2357. <https://doi.org/10.1353/sof.2006.0091>.
- 4 Kinasih, S. (2022). *Sejarah Membuktikan Militer Myanmar Memang Gatal Kudeta*. tirtoid. Retrieved 28 February 2022, from <https://tirtoid/sejarah-membuktikan-militer-myanmar-memang-gatal-kudeta-f91X>.
- 5 Kompas.com. (2022). *Awal Mula Kerusuhan Myanmar: Dipicu Kudeta, Militer Berkuasa*. Kompas.com. Retrieved 28 February 2022, from <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/162024770/awal-mula-kerusuhan-myanmar-dipicu-kudeta-militer-berkuasa?page=all>.
- 6 *Ibid.*
- 7 BBC News Indonesia. (2022). *Anak-anak muda di jantung protes Myanmar: 'Kami tak mau kembali ke masa gelap di bawah diktator'*.BBC News Indonesia. Retrieved 28 February 2022, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56292578>.
- 8 NHK WORLD-JAPAN News. (2022). *Kudeta Myanmar: Satu Tahun Berlalu, Perlawanan Berlanjut*. NHK WORLD. Retrieved 28 February 2022, from <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/backstories/1905/>.
- 9 BBC News Indonesia. (2022). *Anak-anak muda di jantung protes Myanmar*.
- 10 Reuters. (2022). *Factbox: Myanmar's Post-coup Crisis in Numbers*. Reuters. Retrieved 28 February 2022, from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-post-coup-crisis-numbers-2022-01-31/>.
- 11 *Ibid.*
- 12 Sullivan, D. P. (2021). *Dire Consequences: Addressing the Humanitarian Fallout from Myanmar's Coup* (p. 8). Refugees International. Retrieved from <https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/61704056d5c2b338bb5d6744/1634746454791/Dire+Consequences-+Addressing+the+Humanitarian+Fallout+from+Myanmar%E2%80%99s+Coup.pdf>.
- 13 Strangio, S. (2021). *Report: Myanmar Junta Restricting 'Lifesaving' Humanitarian Aid*. The Diplomat. Retrieved 25 February 2022, from <https://thediplomat.com/2021/12/report-myanmar-junta-restricting-lifesaving-humanitarian-aid/>.
- 14 Sullivan, D. P. (2021). *Dire Consequences: Addressing the Humanitarian Fallout from Myanmar's Coup* (p. 9).
- 15 Reuters. (2022). *Factbox: Myanmar's Post-coup Crisis in Numbers*.
- 16 *Ibid.*
- 17 NHK WORLD-JAPAN News. (2022). *Kudeta Myanmar: Satu Tahun Berlalu, Perlawanan Berlanjut*.
- 18 Deutsche Welle. (2022). *Uni Eropa dan Inggris Jatuhkan Sanksi Baru untuk Pejabat Militer Myanmar*. DW. Retrieved 2 March 2022, from <https://www.dw.com/id/ue-inggris-jatuhkan-sanksi-baru-untuk-pejabat-junta-myanmar/a-57987340>.
- 19 Republika Online. (2022). *China dan Rusia Dukung Myanmar Cari Solusi Politik*. Republika Online. Retrieved 2 March 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qggnmp382/china-dan-rusia-dukung-myanmar-cari-solusi-politik>.
- 20 Kapur, R. (2022). *ASEAN and Myanmar: No Sign of Progress*. Lowy Institute. Retrieved 2 March 2022, from <https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/asean-and-myanmar-no-sign-progress>.
- 21 ASEAN Secretariat. (2021). *Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting*. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf>.
- 22 Kompas.com. (2022). *Menlu: Implementasi 5 Poin Konsensus Myanmar Tak Ada Kemajuan Signifikan*. Kompas.com. Retrieved 5 March 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/17061431/menlu-implementasi-5-poin-konsensus-myanmar-tak-ada-kemajuan-signifikan>.
- 23 UNHCR Regional Bureau for Asia and Pacific (RBAP). (2022). *Myanmar Emergency Update* (p. 1). UNHCR. Retrieved from <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20Emergency%20Update%20-%2019%20January%202022.pdf>.
- 24 Allard, T. (2022). *ASEAN appoints Brunei diplomat as envoy to Myanmar*. Reuters. Retrieved 6 March 2022, from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asean-appoints-bruneis-erywan-yusof-envoy-myanmar-sources-2021-08-04/>.
- 25 Strangio, S. (2022). *ASEAN Envoy Cancels Planned Myanmar Trip Due to Junta Stonewalling*. The Diplomat. Retrieved 6 March 2022, from <https://thediplomat.com/2021/10/asean-envoy-cancels-planned-myanmar-trip-due-to-junta-stonewalling/>.
- 26 Harmer, J. (2021). *ASEAN Envoys Meet Myanmar Junta Leader to Press for Dialogue*. AP NEWS. Retrieved 3 March 2022, from <https://apnews.com/article/myanmar-business-global-trade-eb277280603f65d4b3baca9509555548>.
- 27 CNN Indonesia. (2021). *Junta Militer Myanmar Kecewa Tak Diundang KTT ASEAN*. CNN Indonesia. Retrieved 6 March 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211017144346-106-708894/junta-militer-myanmar-kecewa-tak-diundang-ktt-asean>.
- 28 Tempo.co. (2021). *KTT ASEAN Dimulai Tanpa Perwakilan dari Myanmar*. Tempo.co. Retrieved 6 March 2022, from <https://dunia.tempo.co/read/1521406/ktt-asean-dimulai-tanpa-perwakilan-dari-myanmar>.
- 29 Geddie, J., Richardson, A., & MacSwan, A. (2021). *Myanmar declares move to block junta leader from regional summit*. Reuters. Retrieved 3 March 2022, from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-rejects-asean-decision-exclude-junta-leader-summit-2021-10-22/>.
- 30 ASEAN Secretariat. (2008). *The ASEAN Charter*. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>.
- 31 Kapur, R. (2022). *ASEAN and Myanmar: No Sign of Progress*.



Endnotes

- 32 Putri, A., Jasmine, P., Salma, R., Bagasta, G. and Faturrahman, M., 2021. *Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar*. *Nation State: Journal of International Studies*, 4(1), pp.117-139.
- 33 Roza, R. 2021. *Kudeta Militer di Myanmar: Ujian Bagi ASEAN*. Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, XIII (4), pp. 7-12.
- 34 Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia. (2022). *Press Release: Briefing on Cambodia's ASEAN Chairmanship in 2022*. Retrieved from <https://www.mfaic.gov.kh/posts/2021-12-31-Press-Release-Briefing-on-Cambodia-s-ASEAN-Chairmanship-in-2022-on-29-December-2021--10-53-43>.
- 35 *Ibid.*
- 36 Tempo.co. (2022). *Kunjungi Myanmar, Hun Sen Jadi Kepala Negara Pertama yang Temui Pemimpin Junta*. Tempo.co. Retrieved 12 March 2022, from <https://dunia.tempo.co/read/1547519/kunjungi-myanmar-hun-sen-jadi-kepala-negara-pertama-yang-temui-pemimpin-junta/full&view=ok>.
- 37 Al Jazeera. (2022). *Voices of Concern at ASEAN over Hun Sen's Myanmar Visit*. Al Jazeera. Retrieved 12 March 2022, from <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/14/concern-in-asean-over-cambodia-pms-myanmar-visit-malaysia-minister-says>.
- 38 Republika Online. (2022). *ASEAN Retreat Dimulai, Myanmar Masih Jadi Isu Utama*. Republika Online. Retrieved 12 March 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/r7fuc9370/asean-retreat-dimulai-myanmar-masih-jadi-isu-utama>.
- 39 The Jakarta Post. (2022). *Hun Sen Urges Myanmar Junta Chief to Allow Aid, Envoy Visit*. The Jakarta Post. Retrieved 15 March 2022, from <https://www.thejakartapost.com/world/2022/01/26/hun-sen-urges-myanmar-junta-chief-to-allow-aid-envoy-visit.html>.
- 40 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2022). *Press Briefing Menlu RI: ASEAN Foreign Ministers' Retreat*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3338/berita/press-briefing-menlu-ri-asean-foreign-ministers-retreat>.
- 41 Htwe, C., & Htet, K. (2021). *Senior General Min Aung Hlaing to Maintain Foreign, Economic Policies*. The Myanmar Times. Retrieved 8 March 2022, from <https://www.mmtimes.com/news/senior-general-min-aung-hlaing-maintain-foreign-economic-policies.html>.
- 42 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2022). *Indonesian President Reaffirms Importance of Swift Implementation of ASEAN Five Point Consensus During Talks With Pm Hun Sen*. Retrieved 8 March 2022, from <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3278/berita/indonesian-president-reaffirms-importance-of-swift-implementation-of-asean-five-point-consensus-during-talks-with-pm-hun-sen>.
- 43 Republic of the Union of Myanmar National Unity Government. (2022). *Press Release on the Visit of Special Envoy of the ASEAN Myanmar*. Republic of the Union of Myanmar National Unity Government. Retrieved 24 March 2022, from <https://gov.nugmyanmar.org/2022/03/22/press-release-on-the-visit-of-special-envoy-of-the-asean-chair-to-myanmar/>.
- 44 Sochan, R. (2022). *PM Eyes Myanmar Peace Troika*. Phnompenhpost.com. Retrieved 10 March 2022, from <https://www.phnompenhpost.com/national-politics/pm-eyes-myanmar-peace-troika>.
- 45 Peou, S. *Diplomatic Pragmatism: ASEAN's Response to the July 1997 Coup*. Conciliation Resources. Retrieved 10 March 2022, from <https://www.c-r.org/accord/cambodia/diplomatic-pragmatism-aseans-response-july-1997-coup>.
- 46 Merican, D. (2007). *Cambodia's Engagement with ASEAN: Lessons for Timor Leste*. CICIP Working Paper, (14), 12-14. Retrieved 10 March 2022, from <https://cicip.org.kh/wp-content/uploads/2021/02/CICIP-working-paper-14-Cambodias-Engagement-in-ASEAN-by-Din-Merican.pdf>.



Unduh dan baca edisi terbaru *ASEAN Briefs* dari kami di www.habibiecenter.or.id

Tentang The Habibie Center

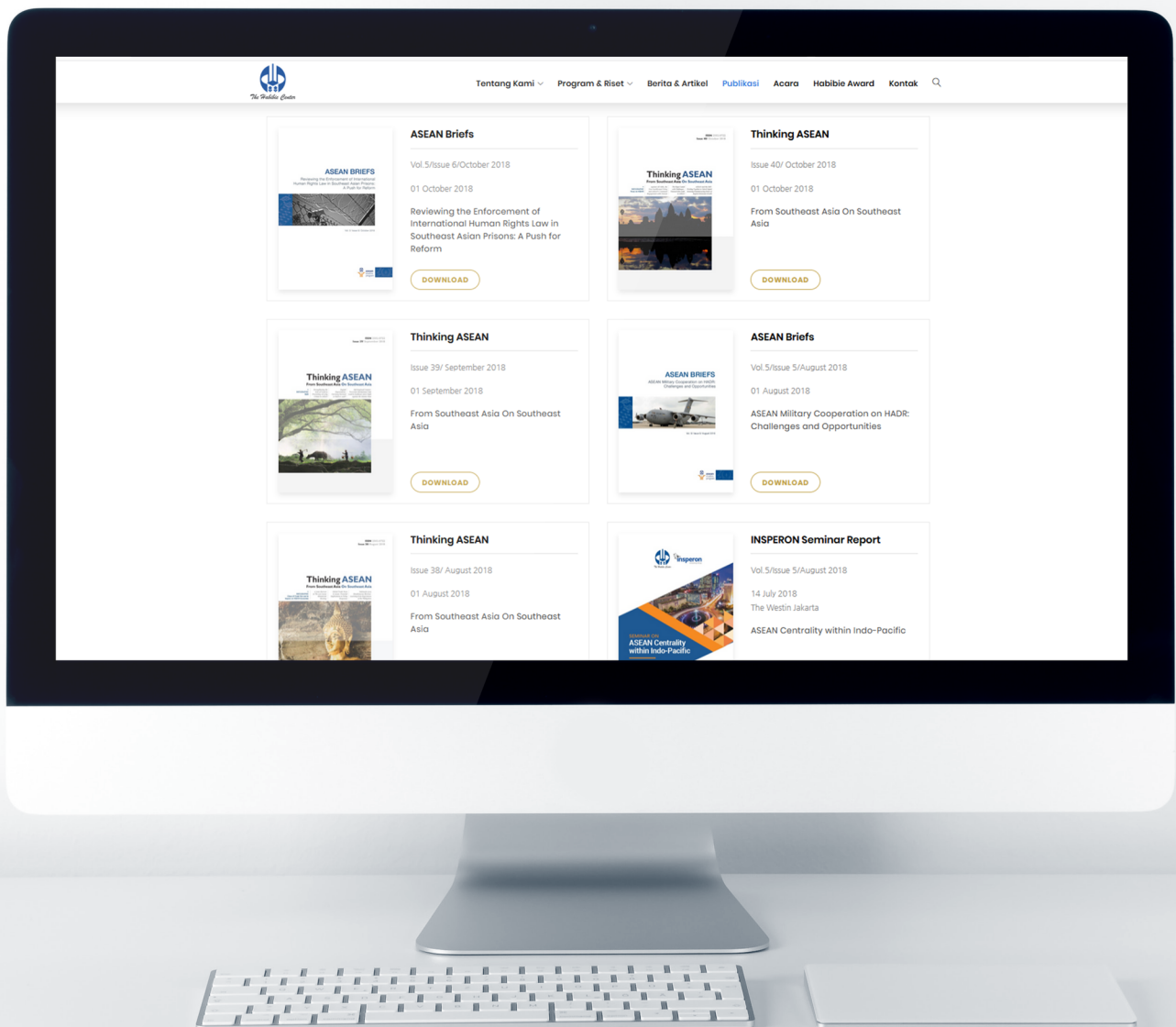
The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, non-pemerintah dan non-profit. Visi The Habibie Center adalah memajukan upaya modernisasi dan demokratisasi di Indonesia berdasarkan moralitas dan integritas budaya, serta nilai-nilai agama. Misi The Habibie Center adalah pertama, menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia, misi kedua yakni, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Tentang Program Studi ASEAN

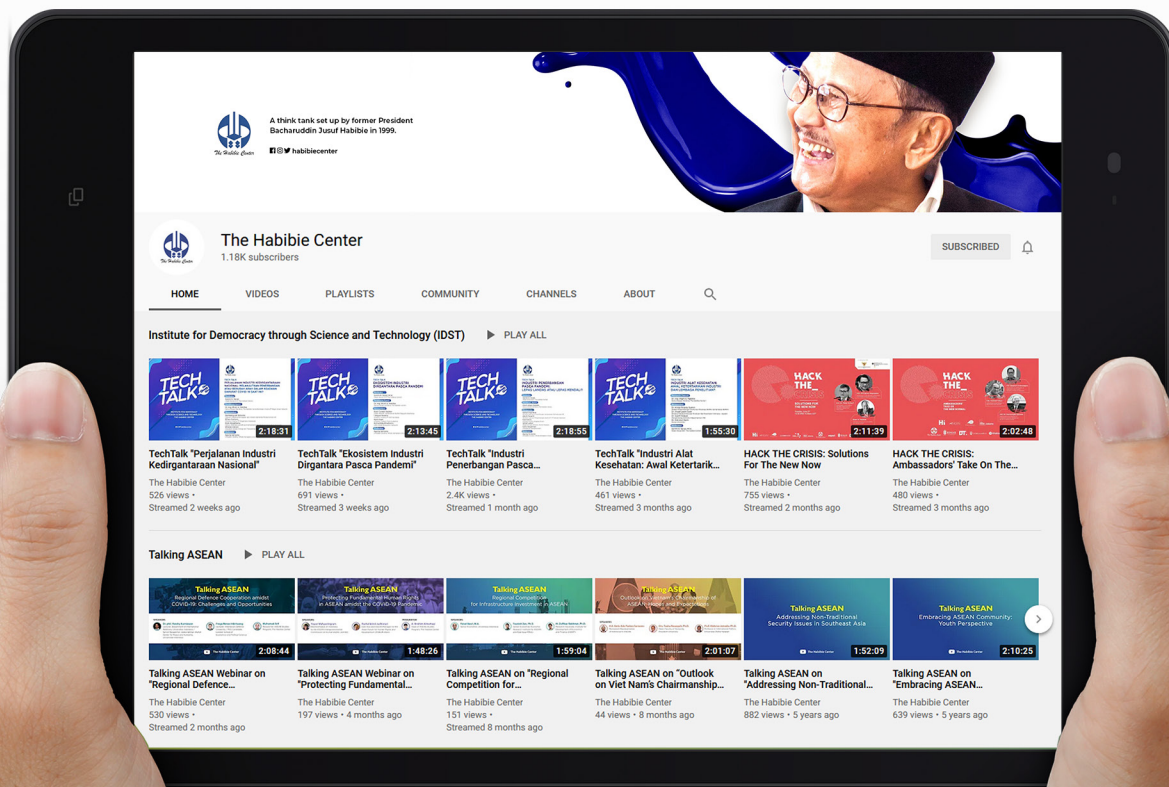
Program Studi ASEAN didirikan pada 24 Februari 2010 sebagai pusat unggulan di ASEAN untuk membantu dalam pengembangan Komunitas ASEAN 2015. The Habibie Center melalui Program Studi ASEAN yang terkait, berharap untuk berkontribusi pada realisasi dengan lebih banyak orang berorientasi ASEAN yang menempatkan nilai tinggi pada demokrasi dan hak asasi manusia bersama lembaga lain yang bekerja menuju tujuan yang sama. Tujuan dari Program Studi ASEAN tidak hanya untuk melakukan penelitian dan diskusi di kalangan akademis dan pemerintahan, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran masyarakat dengan membentuk jaringan yang kuat dari masyarakat sipil di wilayah tersebut. Dengan berdirinya Program Studi ASEAN, The Habibie Center bertujuan untuk memainkan peran dalam pengembangan regional ASEAN.

Foto sampul depan:
(AsiaNews)

Untuk melihat publikasi lainnya,
kunjungi situs kami:
www.habibiecenter.or.id



Berlangganan kanal YouTube kami: The Habibie Center



www.habibiecenter.or.id



ASEAN Studies Program - The Habibie Center

The Habibie Center Building - Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560
Tel: 62 21 781 7211 | Fax: 62 21 781 7212 | Email: thc@habibiecenter.or.id

 facebook.com/habibiecenter  [@habibiecenter](https://twitter.com/habibiecenter)  [@habibiecenter](https://www.instagram.com/habibiecenter)